



**LAPORAN KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ridhonya Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dapat Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembahasan yang terkait dengan tugas Pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar. Lebih khusus Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diperuntukan sebagai pendukung data bagi Pimpinan dalam rangka penetapan kebijakan lebih lanjut.

Kami sadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran masukan dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan agar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun berikutnya dapat lebih sempurna.

Demikian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023.

Pematangsiantar,       Maret 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**JULIANI SIMORANG  
Pembina 1 (IV/b)  
NIP. 19700528 199601 1 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Penjelasan Umum Organisasi .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Data Umum Organisasi.....	5
1.3.1 Personil .....	5
1.3.2 Sarana dan Prasarana .....	5
1.3.2 Pembiayaan .....	7
1.4 Isu Strategis .....	9
1.4.1 Landasan Hukum .....	9
1.4.2 Sistematika Penyajian .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis.....	13
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	18
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	22
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;.....	26
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Kinerja Organisasi .....	28
3.1.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional .....	29
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	30
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	38
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	45
3.2 Realisasi Anggaran .....	49
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	53

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan. Keberadaan Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.khususnya Dinas Perehubungan Kota Pematangsiantar.

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Walikota Pematangsiantar yaitu **“Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat Sejahtera dan Berkualitas.”** Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar mendukung **misi ke 5 (Lima) Wali Kota dan Wakil Walikota Pematangsiantar yaitu Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan** dengan sasaran peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan pelayanan lalu lintas kota dengan menetapkan tujuan Terwujudnya Pengendalian Transportasi yang Optimal, target capaian dimaksud direncanakan melalui sasaran Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan pelayanan lalu lintas kota.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, setiap Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip). Untuk terciptanya Pemerintahan yang baik dibutuhkan adanya penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakup) serta pelaporan dan evaluasi dari program kegiatan. Tujuan dari penyusunan Lakip ini adalah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kinerja yang akan dicapai.

## **1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Tugas pokok dan fungsi serta susunan Organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

### **a. Tugas Pokok :**

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

### **b. Fungsi :**

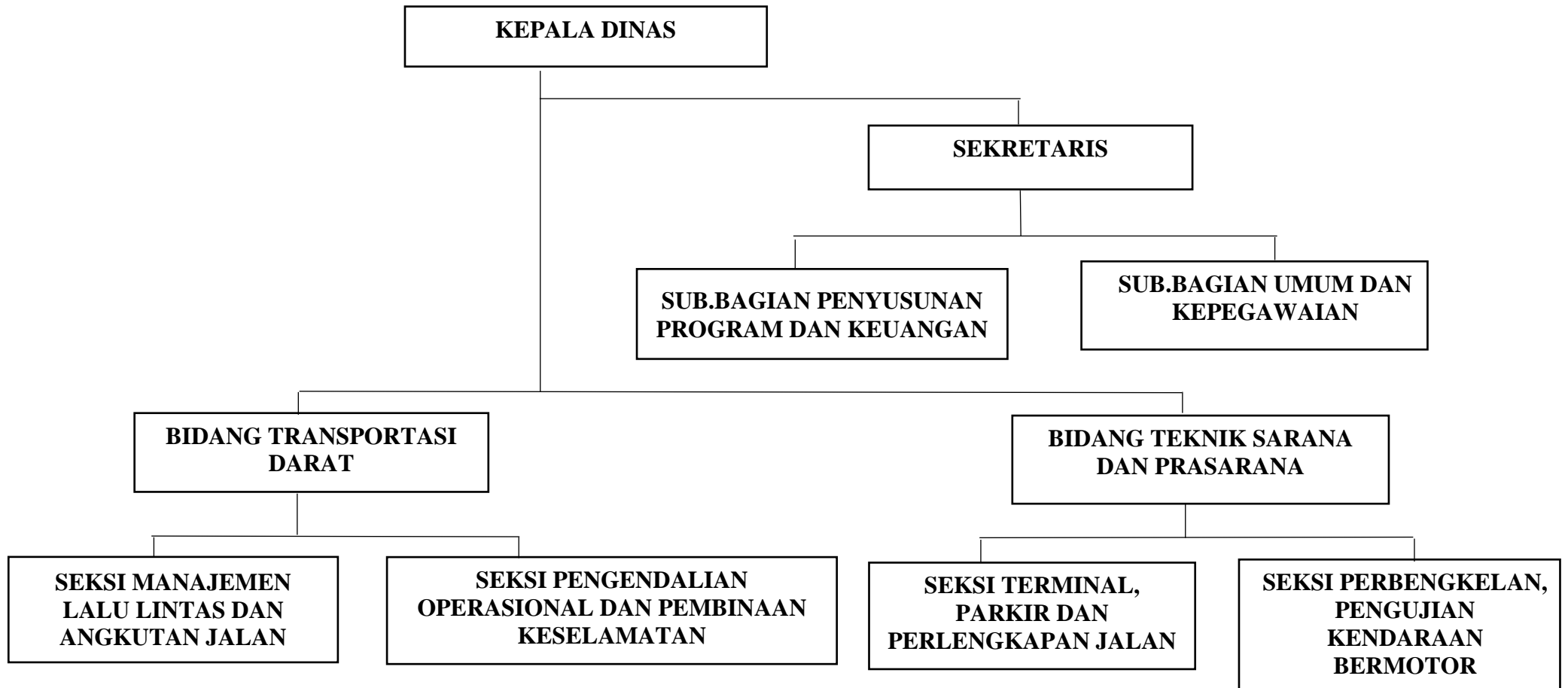
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pelayanan jasa pada perhubungan darat ( Lalu Lintas Angkutan Jalan);
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pengelolaan dan pelayanan jasa dalam perhubungan darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan)
- Pengawasan dan pengamanan pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal
- Pengelolaan lokasi parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor
- Pengaturan lokasi tempat – tempat penyeberangan jalan
- Perumusan dan pelaksanaan aturan tentang pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor
- Pengelolaan lokasi dan tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum.
- Pengadaan, penetapan, pengaturan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas serta tanda – tanda jalan.
- Pemberian rekomendasi izin usaha angkutan, trayek angkutan, trayek angkutan kota, insidentil dan dispensasi pemakaian jalan

- Penetapan ketentuan – ketentuan tambahan mengenai susunan alat alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang/barang secara tertib dan teratur.
- Penetapan larangan penggunaan jalan – jalan tertentu demi kelancaran arus lalu lintas, dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan persetujuan pemerintah pusat untuk jalan nasional.
- Pengaturan sirkulasi lalu lintas di wilayah daerah kota dengan persetujuan Polres,Gubernur untuk jalan Provinsi dan persetujuan pemerintah pusat untuk jalan nasional.
- Pelaksanaan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas serta larangan penggunaan jalan kota bagi jenis dan macam kendaraan bermotor tertentu
- Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat dan wilayah kota.
- Penyelenggaraan perlengkapan jalan pada jaringan jalan.
- Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan .
- Penetapan tarif untuk angkutan darat dalam jaringan trayek kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- Penyelenggaraan bina usaha angkutan orang dan barang.
- Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar terdiri dari :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANGSIANTAR  
Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022**



### 1.3 DATA UMUM ORGANISASI

#### 1.3.1 Personil

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar sebanyak 71 orang PNS dan 89 orang Tenaga Harian Lepas (THL), total Pegawai 160 orang dengan rincian sesuai sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Pangkat, Golongan Pendidikan, Gender**

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Jumlah Pegawai dirinci menurut Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I	3 32 34 2	
2	Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan : a. S2, S3 b. S1 c. D3 d. SMU e. SLTP f. SD g. Paket C	0 41 3 42 - - 1	
3	Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV	1 3 6	
4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender a. Laki-laki b. Perempuan	119 41	
5	Jumlah PNS Keseluruhan	71	
6	Jumlah Tenaga Harian Lepas`	89	
	Jumlah Total	160	

Sumber Data : DUK Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar 2023

#### 1.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang sangat vital dalam melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan Kota



Pematangsiantar, adapun Sarana dan Prasarana yang kami sampaikan pada laporan ini sebagaimana Tabel Data Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 dibawa ini :

**Tabel Daftar Sarana dan Prasarana  
Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar  
Tahun 2023**

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Keadaan Barang (B/KB/RB)		
		Baik	RusakBerat	Jumlah
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	1	0	1
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	0	1
3	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	0	1
4	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	1	0	1
5	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	0	1
6	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	0	1
7	Pick Up	0	1	1
8	Pick Up	4	0	4
9	Sepeda Motor	4	0	4
10	Tool Kit Set	2	0	2
11	Audio Test Set	1	0	1
12	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	1	0	1
13	Mesin Fotocopy Folio	1	0	1
14	Lemari Kayu	3	0	3
15	Filing Cabinet Besi	0	1	1
16	Filing Cabinet Besi	5	0	5
17	White Board	1	0	1
18	Mesin Absensi	1	0	1
19	PAPAN DATA	1	0	1
20	Kios Antrian (5/12/2018)	1	0	1
21	Papan Struktur Organisasi (20 Feb 2019)	1	0	1
22	Meja Kerja Kayu	2	0	2
23	Kursi Kayu	1	0	1
24	Meja Rapat	1	0	1
25	Meja 1/2 Biro	8	0	8
26	Kursi Rapat	1	0	1
27	Kursi Tamu	1	0	1

28	Kursi Putar	4	0	4
29	Bangku Tunggu	2	0	2
30	Kursi Lipat	3	0	3
31	Sofa	2	0	2
32	Mesin Pemotong Rumput	1	0	1
33	A.C. Window	2	0	2

Sumber Data Inventaris Dinas Perhubungan Tahun 2023

### 1.3.2 Pembiayaan

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, mempunyai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 yang secara rinci dapat disajikan sebagaimana dalam Tabel Daftar Anggaran Belanja terlampir.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PEMBIAYAAN	PERSENTASE (%)
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>1.961.661.272</b>	<b>98,98</b>
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>378.376.512</b>	<b>99,74</b>
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	53.376.512	99,93
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	325.000.000	99,70
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>77.990.000,00</b>	<b>87,14</b>
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9.990.000,00	0,00
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000	100,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	43.000.000	99,92
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.373.651.760,00</b>	<b>99,77</b>
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.366.321.760	99,80

	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	7.330.000	94,71
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>131.643.000,00</b>	<b>95,61</b>
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	131.643.000	95,61
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17.277.168.322</b>	<b>70,06</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.709.052.430</b>	<b>99,48</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.709.052.430	99,48
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>140.400.000,00</b>	<b>94,44</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	140.400.000,00	94,44
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>395.491.950,00</b>	<b>94,81</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.999.630	89,54
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.960.000	91,77
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.993.320	87,15
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.539.000,00	99,49
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.515.710.112</b>	<b>51,48</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.138.800,00	99,63
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.311.312,00	92,34
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.416.260.000	51,09
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>516.513.830,00</b>	<b>97,42</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.470.000,00	97,39

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.743.830,00	97,12
	Penngadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.300.000,00	99,59
	<b>Total</b>	<b>19.238.829.594</b>	<b>73,01</b>

#### 1.4 ISU STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengawasan dan pengamanan dalam rangka kelancaran lalu lintas angkutan jalan
2. Peningkatan pengelolaan , penataan parkir dan penertiban parkir liar
3. Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang memadai
4. Peningkatan kerja sama dengan para stake holder dalam pengawasan dan penindakan kendaraan bermotor yang melanggar aturan
5. Peningkatan Disiplin keselamatan dalam berlalu lintas
6. Peningkatan profesioalisme aparatur Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.

##### 1.4.1 Landasan Hukum

LAKIP Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012–2032;
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023.
11. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 )
18. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );

#### **1.4.2 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Data Umum Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran yang mendukung terwujudnya kinerja yang akuntabel.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan Keberhasilan dan Kegagalan, Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta langkah antisipatif dan Strategi Pemecahan Masalah

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Visi Pemerintah Kota Pematangsiantar Visi Kota Pematang Siantar tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2022 adalah

**" Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas"**

Indikasi terwujudnya pencapaian tersebut dimaknai. dengan:

- 1. Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya- upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemic Covid – 19.
- 2. Sejahtera** : Meningkatkan perlindungan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usaha jasa, dagang dan industri, khususnya masa dan atau pasca pandemi Covid 19.
- 3. Berkualitas** : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa responsive serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan



pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit serta mewujudkan daya tarik sebagai Sub Pusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi *hinterland*.

Upaya perwujudan Visi tersebut di atas diharapkan dapat dicapai melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan heterogenitas yang berkualitas.

Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar regional, perekonomian.

2. Memperkuat dan memulihkan penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi atau paska pandemi Covid 19.

Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance dan corporate governance*.

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang professional .

4. Meningkatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, kebersihan dan infrastruktur, keindahan pengembangan lingkungan kota secara berkelanjutan

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Dalam Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2027, Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar mendukung **misi ke 5 (Lima) Wali Kota dan Wakil Walikota Pematangsiantar yaitu Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan** dengan sasaran peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan pelayanan lalu lintas kota. Untuk mendukung visi Wali Kota dan Wakil Walikota tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar menyusun Rencana Strategis (renstra) dengan menetapkan tujuan Terwujudnya Pengendalian Transportasi yang Optimal, target capaian dimaksud direncanakan melalui sasaran Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan pelayanan lalu lintas kota.

Keberadaan Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2022-2027 (sesuai Renstra)**

No	RPJMD				RENSTRA				
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur wilayah kota sesuai dengan peruntukannya	Persenentase kesesuaian tata ruang	Terwujudnya pengendalian transportasi yang optimal	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ
								Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi
									Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan uji kir

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
									Indeks kepuasan masyarakat (ikm) terhadap pelayanan perhubungan
								Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip) dinas perhubungan

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar 2022-2027

**Tabel 2.1.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan TargetJangka Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar**  
**Tahun 2022-2027 (Sesuai Renstra)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
					2023	2024	2025	2026	2027
	Terwujudnya pengendalian transportasi yang optimal		Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik		96.25%	97.13%	97.52%	97.84%	98.34%

		Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	72.14%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan Kualitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi	n/a	50%	60%	70%	80%	90%
			Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan UJI KIR	56.25%	65%	70%	75%	80%	85%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	75%	78%	79%	80%	85%	87%
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan		CC	B	B	B	B

Sumber Data : Renstra Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka dari itu berdasarkan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar tentang penetapan indikator kinerja utama pada Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2022 – 2027**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>FORMULA/RUMUS PERHUTUNGAN CAPAIAN IKU</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Terwujudnya pengendalian transportasi yang optimal	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan}} \times 100\%$	Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	
2	Meningkatkan ketersediaan fasilitas LLAJ	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana perlengkapan jalan yang ada}}{\text{Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan jalan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase titik kemacetan lalu lintas teratasi	$\frac{\text{jumlah tik lalu lintas yang teratasi}}{\text{Jumlah seluruh titik kemcaetan lalu lintas}} \times 100\%$	Bidang Perhubungan Darat	

		Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan UJI KIR	$\frac{\text{Jumlah kendaraan bermotor yang lulus Uji KIR}}{\text{Jumlah Kendaraan bermotor wajib melaksanakan uji KIR}} \times 100\%$	Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	
		Persentase Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan	Bidang Teknik Sarana dan Prasarana dan Bidang Perhubungan Darat	
4	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	Sekretariat	

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsibtar Nomor : 000.8.6.3/949/12.72.16/III/2023

## 2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Kebijakan dan Program, kemudian ditetapkan dalam Rencana Strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023.

Dalam mekanisme manajemen Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Kota Pematangsiantar, Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar memiliki posisi strategis, tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang maksimal Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar pada tahun 2023 telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Visi-Misi yang tercantum didalam RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Dibawah ini di sajikan tabel Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023, terlampir sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	80%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lalu lintas angkutan jalan	Persentase Titik Kemacetan Lalu Lintas yang Teratasi	88.88%
		Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan UJI KIR	65%
		V/C ratio di jalan Kota	0.81
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Public sector Transportasi	78%
3	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Perhubungan	B

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.648.555.424	.APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.208.395.800	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>18.856.951.224</b>	

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2023

Adapun pagu anggaran program pada tabel diatas adalah pagu yang disampaikan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2023 yang merupakan pagu perubahan penetapan sementara pada P.APBD Ta. 2023 yang belum final, maka dari itu berikut adalah pagu final Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar pada P. APBD TA. 2023 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.277.168.322	.APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.961.661.272	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>19.238.829.954</b>	

Dalam Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar menyertakan tujuan dan indicator tujuan, Sementara sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di sampaikan adalah pada level sasaran kinerja, maka dari itu Tujuan dan Indikator Tujuan yang ada pada tabel IKU tidak disertakan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Indikator Kineja Utama (IKU) dan Indikator kinerja yang lain merupakan indikator yang dirumuskan untuk mengukur kinerja. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka penyempurnaan sasaran dan indicator kinerja, Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar telah melaksanakan evaluasi sakis terkait penetapan target, sasaran dan indicator kinerja oleh Menpan RB dimana terdapat sasaran, indicator maupun penetapan target yang kurang tepat, sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN DAN INDIKATOR (SEBELUM)				SASARAN DAN INDIKATOR (Saran evaluator Kementerian PAN dan RB pada evaluasi SAKIP dan RB)			
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS PERHUTUNGAN CAPAIAN IKU	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS PERHUTUNGAN CAPAIAN IKU	TARGET
Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	$\frac{\text{Jumlah fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	60,00	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan	$\frac{\text{Jumlah fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah fasilitas lalu lintas angkutan jalan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	80,00
Meningkatkan Kualitas pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Persentase titik kemacetan lalu lintas teratasi	$\frac{\text{jumlah titik kemacetan lalu lintas yang teratasi}}{\text{Jumlah seluruh titik kemacetan lalu lintas}} \times 100\%$	50,00	Meningkatkan Kualitas pelayanan dan Kinerja lalu lintas angkutan jalan	Persentase titik kemacetan lalu lintas teratasi	$\frac{\text{jumlah titik kemacetan lalu lintas yang teratasi}}{\text{Jumlah seluruh titik kemacetan lalu lintas}} \times 100\%$	88,88
	Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan Uji KIR	$\frac{\text{Jumlah kendaraan bermotor yang lulus Uji KIR}}{\text{Jumlah Kendaraan bermotor wajib melaksanakan uji KIR}} \times 100\%$	65,00		Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan Uji KIR	$\frac{\text{Jumlah kendaraan bermotor yang lulus Uji KIR}}{\text{Jumlah Kendaraan bermotor wajib melaksanakan uji KIR}} \times 100\%$	65,00
					Ratio volume lalu lintas perkapasitas ruas jalan	V/C Rasio di Jalan	0,81
	Persentase Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan	78%		Persentase Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan	78%
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	CC	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	B

Dari tabel diatas terdapat tambahan satu indikator kinerja v/c rasio di jalan kota pada sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan dan Kinerja lalu lintas angkutan jalan. Tindak lanjut dari evaluasi penyempurnaan sasaran dan indicator kinerja yang di evaluasi oleh evaluator Kemenpan RB tersebut menjadi sasaran dan indicator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2023.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati.. Pengukuran capaian kerja dilakukan dengan metode pembandingan capaian kinerja sasaran yaitu dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang dan dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

#### 3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Pada Tahun 2023 adalah tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2022 – 2027 Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**

**Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	80,00	80,00	100
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lalu lintas angkutan jalan	Persentase titik kemacetan lalu lintas teratasi	88,88	88,88	100
		Persentase kendaraan bermotor yang melaksanakan UJI KIR	65,00	51,17	78,72
		Ratio volume lalu lintas perkapasitas ruas jalan	0,81	0,58	71,60
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Public sector Transportasi	78	90,57	116,12
3	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perhubungan	B	CC	
			(Predikat nilai 70 - 80)	(Predikat nilai 50 - 60)	
			70	60	85.71
<b>Rata – Rata Kinerja</b>					<b>92,03</b>

Secara keseluruhan tingkat rata – rata capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar berada pada klasifikasi penilaian yang sangat tinggi yaitu 92,03%. Dari 6 (enam) indikator tersebut terdapat 3 (tiga) indikator dengan rata-rata capaian indikator kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi, 2 (dua) indicator dengan rata-rata capaian indikator kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja tinggi dan 1 (satu) indicator dengan rata-rata capaian indikator kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sedang.

**3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir**

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022 – 2027 terjadi perbedaan dalam penentuan sasaran strategis dan indikator kinerja, dimana tahun 2023 adalah

tahun awal untuk Renstra Dinas Perhubungan periode tahun 2022-2027, dikarenakan untuk tahun 2022 merupakan bagian dari Renstra Dinas Perhubungan periode 2017 – 2022 yang merupakan tahun dasar (Kondisi Awal) terhadap target pada tahun 2023, sehingga ada beberapa sasaran maupun indicator kinerja yang capaian realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut dibawah ini disajikan tabel perbandingan kinerja tahun ini dengan tahun lalu :

**Tabel 3.1.2.**  
**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	75	77.19	102.92	80	80	100
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lalu lintas angkutan jalan	Persentase Titik Kemacetan Lalu Lintas yang Teratasi				88.88	88.88	100
		Persentase Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Uji KIR	7.541	3.455	45.81	65.00	51.17	78.72
		V/C ratio di jalan Kota				0,81	0,58	71,60
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Public sector Transportasi	78	71.83	94.13	78	90.57	116.12
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Perhubungan				B (Predikat nilai 70 - 80)	CC (Predikat nilai 50 - 60)	
						70	60	85.71

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dan kesesuaian pelaksanaan kinerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rencana Strategis) maka disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rencana Strategis) sebagaimana berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini**  
**dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi	% Capaian
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2023	Tahun 2023
1	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	100%	100%	100%	100%	100%	80	80
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lalu lintas angkutan jalan	Persentase Titik Kemacetan Lalu Lintas yang Teratasi	50%	60%	70%	80%	90%	88.88	177,76
		Persentase Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan UJI KIR	65%	67%	75%	80%	85%	51.17	78.72
		V/C ratio di jalan Kota							
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Public sector Transportasi	78%	79%	80%	85%	87%	90.57	116.12
3	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Perhubungan	CC	B	B	B	B	CC (Predikat nilai 50 - 60)	
								60	100



Perlu untuk diketahui bahwa pada indikator kinerja v/c ratio di jalan kota merupakan indikator kinerja yang tidak terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar hal ini dikarenakan indicator tersebut merupakan indicator kinerja tambahan atas evaluasi oleh evaluator Kemenpan RB yang perbandingan target dan realisasi kinerjanya tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar.

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian standar nasional yang dikaitkan dengan kinerja daerah pada Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, terdapat satu indikator yang bisa dikaitkan langsung terhadap capaian nasional yaitu pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Provinsi Sumatera Utara	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4		5	6=4/5*100
1	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	80	91.86	91.86	87.08
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lalu lintas angkutan jalan	Persentase Titik Kemacetan Lalu Lintas yang Teratasi	88.89			
		Persentase Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan UJI KIR	50			
		V/C ratio di jalan Kota	0.61			
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Public sector Transportasi	78			
3	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Perhubungan	CC			

**3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan.**

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Organisasi, maka perlu dilakukan analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusi alternative dan evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran, untuk itu dijelaskan dalam tabel adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.5.**  
**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja**  
**Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS		SOLUSI YANG DILAKUKAN
						KEBERHASILAN	KEGAGALAN	
1	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	80	80	100	kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas	kondisi rambu rusak dan tidak terbaca	Meningkatkan anggaran pengadaan dan pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas
						mengurangi kecelakaan lalu lintas	Perubahan rekayasa lalin yang mengakibatkan kebutuhan atas rambu menjadi bertambah	Adanya perencanaan rekayasa lalin yang jelas sehingga dapat menentukan titik-titik dan jumlah rambu yang dibutuhkan terpenuhi secara teknis
								Pengadaan rambu secara bertahap dengan menetapkan titik-titik lokasi yang menjadi prioritas utama
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lalu lintas angkutan jalan	Persentase Titik Kemacetan Lalu Lintas yang Teratasi	88.88	88.88	100	semangat kerja para aparat	Kurangnya sarana prasarana personil di lapangan dalam pelaksanaan tugas seperti Handy Talky (HT) yg kurang	Penambahan perlengkapan sarana dan prasarana personil dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

							memadai, sepeda motor yg jumlahnya sangat minimum	
							Sarana lalu lintas di titik - titik tertentu yang sangat minimal sehingga pengendara kerap melanggar yang menjadi penyebab macet seperti di titik Jln. M.H sitorus dan Jln, Adam Malik perlu dilakukan rekayasa yang harus di dukung dengan sarana lalu lintas.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas di banyak titik jalan kota yang saat ini masih minimal.
							Kemacetan yang di sebabkan oleh pelanggaran dan rendahnya kesadaran pengemudi angkutan kota dan angkutan desa yang ngetem di lokasi yang tidak seharusnya dan kurangnya perangkat SDM pendukung di Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dalam penindakan terhadap pelanggaran di maksud	Pemenuhan kelengkapan perangkat kompetensi SDM Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar sehingga bisa dilakukan penegakan aturan terhadap angkutan kota dan angkutan desa yang melanggar.
							Untuk titik simpang dua kemacetan di sebabkan sempitnya badan jalan di persimpangan Jln. Sisingamangaraja yang tidak mampu	Untuk titik simpang dua harus melakukan pelepasan lahan di Jln. Sisingamangaraja traffic light guna memperlebar badan jalan.

							menampung volume kendaraan.	
							Bangunan Eks Timbangan Simpang Dua yang membuat badan jalan menjadi sempit dan menghalangi jarak pandang dari setiap sudut jalan simpang dua.	
							Belum berfungsinya ring road yang seharusnya menjadi solusi menjadi pengalihan arus sepanjang jalan medan menuju parapat.	Ring road merupakan solusi utama untuk mengurai kemacetan sepanjang Jln. Medan dan Jln. Sisingamangaraja sebab penambahan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan penambahan ruas badan jalan.
		Persentase Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan UJI KIR	65	51,17	78,72	kendaraan laik jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	kurangnya kesadaran pemilik kendaraan angkutan dalam melakukan pengujian kendaraan	Pelaksanaan razia minimal 3x dalam setahun
						Adanya standarisasi Kalibrasi alat uji dan Akreditasi guna memastikan kelayakan alat dan pengoperasionalan pengujian kendaraan bermotor	kurang tersedianya anggaran dalam pengadaan dan perawatan untuk gedung dan alat uji serta pendukung untuk memenuhi standarisasi persyaratan akreditasi pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan alat uji dan sistem informasi pengujian sesuai dengan kebutuhan dan standarisasi kementerian

		V/C ratio di jalan Kota	0,81	0,58	71,60	Bahwa rasio jalan di sekitaran Kota Pematangsiantar untuk saat ini rata-rata 0.58 yang artinya tingkat pelayanan jalan (LoS = Level of Service) pada level c (arus stabil)	Jumlah Penguji Kendaraan Bermotor terbatas	Meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan teknis aparatur di bidang transportasi darat
							kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia di Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar dirasakan masih kurang memadai. karena belum pernah mengikuti diklat teknis perhubungan.	Meningkatkan Anggaran Pendidikan dan pelatihan Tekhnis Aparatur di bidang Transportasi Darat.
							Bahwa jalan merdeka pada jam puncak dapat dikategorikan mengalami kemacetan dikarenakan 2 lajur dipakai oleh Angkot dan kendaraan lain yang parkir sembarangan	Pemerintah Kota memberi peluang untuk membuka Formasi Penerimaan CPNS akan Kebutuhan tenaga Tekhnis Perhubungan/ Transportasi Darat.
								Meningkatkan kelas jalan pada beberapa ruas jalan
								Diperlukan Terminal Tipe C

							Terbatasnya anggaran untuk kegiatan manajemen lalu lintas sarana pendukung lainnya untuk kelancaran dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar.	Dukungan anggaran untuk melaksanakan kajian rencana induk jaringan lalu lintas Kota Pematangsiantar yang dilaksanakan telah ada
								Tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut pada Dinas perhubungan kota Pematangsiantar
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Public sector Transportasi	78	90,57	116,12	pelayanan yang cepat dan memuaskan serta terciptanya kendaraan yang laik jalan	masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan penguji kendaraan bermotor	Untuk diharapkan peningkatan pagu anggaran untuk mendukung pengadaan alat penguji kendaraan bermotor dan sarana prasarana lalu lintas lainnya
						SDM petugas pelaksana penguji ditingkatkan	masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat berlalu lintas sehingga tidak terciptanya ketertiban keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas	melakukan sosialisasi peraturan lalu lintas serta melaksanakan kegiatan ketertiban, pengaturan dan pengawasan lalu lintas
						adanya tingkat keamanan dan penunjang kesehatan bagi petugas agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal	Masih kurangnya pegawai yang belum memenuhi keahlian / kompetensi dalam perbaikan perlengkapan jalan.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikutsertakan diklat teknis di bidang transportasi.

								Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi dengan berbasis IT
								bersikap terbuka dalam menerima permintaan, saran dan kritik yang diberikan oleh masyarakat
								Melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja sebagai penyedia pelayanan public
								Adanya media informasi yang memadai untuk memuaskan dan mempermudah pemilik kendaraan wajib uji
3	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Perhubungan	B (Predikat nilai 70 - 80)	CC (Predikat nilai 50 - 60)			Kurang tepatnya dalam menetapkan sasaran dan indikator kinerja	Evaluasi terhadap penetapan sasaran dan indikator yang kinerja yang tepat. Terukur dan dapat tercapai
			70	60	85.71		Lemahnya data dukung pencapaian kinerja	Pemantauan mengenai perkembangan/kemajuan pencapaian kinerja setiap triwulan



Keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar untuk kinerja tahun 2023 ditunjukkan dengan tercapainya beberapa target-target indikator yang telah ditetapkan. Meskipun ada 2 indikator yang tidak tercapai 100% namun dilihat dari angka realisasi capaian masih tergolong tinggi yakni diatas 78%, sehingga masih mendorong keberhasilan meningkatnya kinerja Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar.

Dengan pencapaian kinerja tersebut dapat diartikan bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan kinerja disepanjang tahun anggaran 2023 dapat diminimalisir. Dari hasil analisa terhadap pencapaian target kinerja dapat disimpulkan bahwa factor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja di beberapa sasaran dikarenakan hal – hal sebagai berikut :

- a. Adanya Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
- b. Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
- c. Koordinasi yang intens baik internal maupun eksternal.
- d. Semangat kerja Aparatur
- e. Pemantauan mengenai perkembangan/kemajuan pencapaian kinerja OPD setiap triwulan
- f. Skala prioritas anggaran sesuai dengan kebutuhan

Sementara faktor kegagalan kinerja disebabkan antara lain:

- a. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia di Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar karena belum pernah mengikuti diklat teknis perhubungan.
- b. Terbatasnya anggaran dalam mendukung kebutuhan kegiatan skala prioritas kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja serta kegiatan administrasi keuangan.
- c. Kurang optimalnya dalam penyampaian data dukung terhadap pencapaian kinerja

Solusi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Mengevaluasi ulang target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.

- b. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
- c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap sasaran secara berkala
- d. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja serta kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah mendapatkan dukungan anggaran yang sesuai kebutuhan kegiatan skala prioritas.
- e. Evaluasi kembali terhadap anggaran dana masing – masing kegiatan agar semua kegiatan yang diprogramkan dapat terlaksana dengan baik.
- f. Kerjasama antara OPD untuk bersinergi dalam pencapaian visi misi Walikota.

### 3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar melaksanakan 2 Program dan 9 Kegiatan serta 20 sub kegiatan, secara keseluruhan realisasi program/kegiatan dapat menghasilkan realisasi kinerja dengan capaian 92.03 % dengan rata dengan realisasi keuangan sebesar 73,01 %. Berdasarkan capaian tersebut dapat dihitung tingkat efisiensi, dimana efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya anggaran untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja yang dapat dilihat pada rumus perhitungan berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\% \text{ Rata-rata Capaian Kinerja}}{\% \text{ Rata-rata Capaian Penyerapan Anggaran}}$$

Kriteria pengukuran efisiensi yang digunakan adalah (1) Jika nilai efisiensi lebih besar atau sama dengan satu ( $\geq 1$ ), maka terjadi efisiensi; dan (2) Jika nilai efisiensi lebih kecil dari satu ( $<1$ ), maka efisiensi tidak tercapai. Dengan demikian, hasil analisis efisiensi anggaran Bappeda Kota Pematangsiantar untuk Tahun 2023 adalah :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{92,03\%}{73,01} = 1,26$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar terhadap capaian realisasi anggaran sebesar  $\geq 1$ , artinya terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

Dapat dikatakan bahwa capaian realisasi keuangan tidak sepenuhnya terserap dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.6

## Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program(Outcome) / kegiatan (output)	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Realisasi Anggaran	Sisa	Rincian Masalah
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase ketersediaan lalu lintas angkutan jalan</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>	<b>100</b>	<b>1.961.661.272</b>	<b>1.941.693.265</b>	<b>98,98</b>	<b>19.968.007</b>	
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyediaan perlengkapan jalan yang terpasang dan terpelihara</b>	<b>39 Unit</b>	<b>39 Unit</b>	<b>100</b>	<b>378.376.512</b>	<b>377.379.900</b>	<b>99,74</b>	<b>996.612</b>	
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	28 Unit	28 Unit	100	53.376.512	53.340.000	99,93	36.512	
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kabupaten/Kota yang Tersedia	11 Unit	11 Unit	100	325.000.000	324.039.900	100	960.100	
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>87</b>	<b>77.990.000,00</b>	<b>67.964.000,00</b>	<b>87</b>	<b>10.026.000</b>	
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor yang tersedia	2 Unit	0 Unit	-	9.990.000,00	-	-	!	
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100	25.000.000	25.000.000	100	0	

	Kendaraan Bermotor									
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7 Unit	7 Unit	100	43.000.000	42.964.000	100	36.000	
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>cakupan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>1.373.651.760,00</b>	<b>1.370.480.350,00</b>	<b>100</b>	<b>3.171.410</b>	
6	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	13 Laporan	13 Laporan	100	1.366.321.760	1.363.538.250	100	2.783.510	
7	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	95	7.330.000	6.942.100	95	387.900	
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>1 laporan</b>	<b>1 laporan</b>	<b>96</b>	<b>131.643.000,00</b>	<b>125.869.015,00</b>	<b>96</b>	<b>5.773.985</b>	
8	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 laporan	1 Laporan	96	131.643.000	125.869.015	96	5.773.985	

2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>B</b> 70	<b>Predikat</b>	70	17.277.168.322	12.103.730.223	70	5.173.438.099	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	99	5.709.052.430	5.679.407.836	99	29.644.594	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	75 Orang	99	5.709.052.430	5.679.407.836	99	29.644.594	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	159 Paket	159 Paket	94	140.400.000,00	132.600.000,00	94	7.800.000	
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	159 Paket	159 Paket	94	140.400.000,00	132.600.000,00	94	7.800.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan 'Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	95	395.491.950,00	374.951.885,00	95	20.540.065	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	28 Paket	90	89.999.630	80.586.637	90	9.412.993	
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	92	11.960.000	10.975.250	92	984.750	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	87	69.993.320	60.998.668	87	8.994.652	

14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	99	223.539.000,00	222.391.330,00	99	1.147.670	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>51</b>	<b>10.515.710.112</b>	<b>5.413.606.061</b>	<b>51</b>	<b>5.102.104.051</b>	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	100	5.138.800,00	5.120.000,00	100	18.800	kegiatan bagi hasil retribusi parkir tepi jalan umum kepada jukir tidak tercapai dari target yang ditetapkan
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92	94.311.312,00	87.083.333,00	92	7.227.979	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	52 Laporan	52 Laporan	51	10.416.260.000	5.321.402.728	51	5.094.857.272	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>97</b>	<b>516.513.830,00</b>	<b>503.164.441,00</b>	<b>97</b>	<b>13.349.389</b>	

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	97	123.470.000,00	120.249.825,00	97	3.220.175	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	97	344.743.830,00	334.814.616,00	97	9.929.214	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit	100	48.300.000,00	48.100.000,00	100	200.000	
	<b>Total Pagu</b>					<b>19.238.829.594</b>	<b>14.045.423.488</b>	<b>73,01</b>	<b>5.193.406.106</b>	



### 3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut tabel analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar :

**Tabel 3.1.7**

#### **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2023			TAHUN 2023		
						TAREGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALIASAI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	80	80	100	53.376.512	53.340.000	99,93
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lalu lintas angkutan jalan	Persentase Titik Kemacetan Lalu Lintas yang Teratasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	88,88	88,88	100,00	1.366.321.760	1.363.538.250	99,80
3	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lalu lintas angkutan jalan	Persentase Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan UJI KIR	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	65	51,17	78,72	25.000.000	25.000.000	100,00
4	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lalu lintas angkutan jalan	V/C ratio di jalan Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0,81	0,58	71,60	0	0	0!

5	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja lalu lintas angkutan jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Public sector Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	78	90,57	116,12	77.990.000,00	67.964.000,00	87,14					
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											
6	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			70	60	85,71	17.277.168.322	12.103.730.223	70,06					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							B (Predikat nilai 70 - 80)	CC (Predikat nilai 50 - 60)	5.709.052.430	5.679.407.836	99,48
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									140.400.000,00	132.600.000,00	94,44
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									89.999.630	80.586.637	89,54
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor									11.960.000	10.975.250	91,77
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									69.993.320	60.998.668	87,15

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				223.539.000,00	222.391.330,00	99,49
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.138.800,00	5.120.000,00	99,63
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				94.311.312,00	87.083.333,00	92,34
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.416.260.000	5.321.402.728	51,09
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				123.470.000,00	120.249.825,00	97,39
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				344.743.830,00	334.814.616,00	97,12
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				48.300.000,00	48.100.000,00	99,59

Penjelasan atas realisasi dan capaian :

1. Terkait indikator kinerja Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ dari sisi capain kinerja tercapai 100% sedangkan dari sisi capaian penyerapan anggaran tercapai 99,93 % hal ini dikarenakan adanya penyesuaian harga di lapangan terhadap komponen jenis belanja yang direalisasikan sehingga dapat diartikan hasil perbandingan persentase tidak begitu jauh antara capain kinerja dengan capaian anggaran yang mendukung kinerja tersebut
2. Terkait indikator kinerja Persentase Titik Kemacetan Lalu Lintas yang Teratasi dari sisi capain kinerja tercapai 100% sedangkan dari sisi capaian penyerapan anggaran tercapai 99,80 % hal ini dikarenakan adanya penyesuain harga di lapangan terhadap komponen jenis belanja yang direalisasikan sehingga dapat diartikan hasil perbandingan persentase tidak begitu jauh antara capain kinerja dengan capaian anggaran yang mendukung kinerja tersebut.
3. Terkait indikator kinerja Persentase Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan UJI KIR dari sisi capain kinerja tercapai 78,72% sedangkan dari sisi capaian penyerapan anggaran tercapai 100 % hal ini dikarenakan masyarakat ada yang belum melaksanakan uji kir kendaraanya, namun dukungan pengadaan alat pendukung (bukti lulus uji) dalam pelaksanaan uji kir harus tetap diadakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.
4. Terkait indikator kinerja V/C ratio di jalan Kota dari sisi capain kinerja tercapai 71,60% sedangkan dukungan anggaran untuk melaksanakan kinerja tersebut yaitu kajian rencana induk jaringan lalu lintas Kota Pematangsiantar yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Pematangsiantar
5. Terkait indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Public sector Transportasi dari sisi capain kinerja tercapai 116,12% sedangkan dari sisi capaian penyerapan anggaran tercapai 87,14 % hal ini dikarenakan masyarakat yang melaksanakan uji kir kendaraanya merasa puas atas pelayanan yang diberikan petugas namun dalam melakuakan perawatan alat uji belum maksimal.

6. Terkait indikator kinerja Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar yang di evaluasi oleh Inspektorat memperoleh Nilai CC sementara dari sisi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian realisasi 70,06% hal ini dikarenakan adanya kegiatan bagi hasil retribusi parkir tepi jalan umum kepada jukir tidak tercapai dari target yang ditetapkan

### 3.1. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar pada Tahun anggaran 2023, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 19.238.829.594 (*Sembilan Belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>1.961.661.272</b>	<b>1.941.693.265</b>	<b>98,98</b>
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>378.376.512</b>	<b>377.379.900</b>	<b>99,74</b>
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	53.376.512	53.340.000	99,93
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	325.000.000	324.039.900	99,70
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>77.990.000,00</b>	<b>67.964.000,00</b>	<b>87,14</b>
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9.990.000,00	-	0,00
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000	25.000.000	100,00

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	43.000.000	42.964.000	99,92
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.373.651.760,00</b>	<b>1.370.480.350,00</b>	<b>99,77</b>
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.366.321.760	1.363.538.250	99,80
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	7.330.000	6.942.100	94,71
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>131.643.000,00</b>	<b>125.869.015,00</b>	<b>95,61</b>
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	131.643.000	125.869.015	95,61
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17.277.168.322</b>	<b>12.103.730.223</b>	<b>70,06</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.709.052.430</b>	<b>5.679.407.836</b>	<b>99,48</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.709.052.430	5.679.407.836	99,48
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>140.400.000,00</b>	<b>132.600.000,00</b>	<b>94,44</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	140.400.000,00	132.600.000,00	94,44
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>395.491.950,00</b>	<b>374.951.885,00</b>	<b>94,81</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.999.630	80.586.637	89,54
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.960.000	10.975.250	91,77
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.993.320	60.998.668	87,15

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.539.000,00	222.391.330,00	99,49
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.515.710.112</b>	<b>5.413.606.061</b>	<b>51,48</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.138.800,00	5.120.000,00	99,63
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.311.312,00	87.083.333,00	92,34
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.416.260.000	5.321.402.728	51,09
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>516.513.830,00</b>	<b>503.164.441,00</b>	<b>97,42</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.470.000,00	120.249.825,00	97,39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.743.830,00	334.814.616,00	97,12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.300.000,00	48.100.000,00	99,59
	<b>Total</b>	<b>19.238.829.594</b>	<b>14.045.423.488</b>	<b>73,01</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2023

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2023, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun. Secara keseluruhan tingkat rata – rata capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar berada pada klasifikasi penilaian yang sangat tinggi yaitu 92,03%. Dari 6 (enam) indikator tersebut terdapat 3 (tiga) indikator dengan rata-rata capaian indikator kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sangat tinggi, 2 (dua) indicator dengan rata-rata capaian indikator kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja tinggi dan 1 (satu) indicator dengan rata-rata capaian indikator kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sedang dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 73,,01 % dengan pencapaian kinerja tersebut dapat diartikan bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan kinerja disepanjang tahun anggaran 2023 dapat diminimalisir.

Namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan, khususnya Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang. Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dilakukan adalah:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan lebih cermat untuk pencapaian target indikator kinerja dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.



2. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul, sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditekan/ menurun.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di di masing – masing bidang guna pencapaian kinerja yang lebih baik.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang pencapaian target kinerja dinas secara maksimal.

Penyusunan LAKIP 2023 masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi komitmen bersama, untuk perbaiki dan penyempurnaan LAKIP:

1. Mewujudkan dokumen perencanaan kinerja yang didukung dengan target-target indikator kinerja yang terukur
2. Mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja yang komprehensif dan transparan di masing-masing unit kerja dengan mengacu pada perkembangan data Indikator Kinerja.
3. Indikator Kinerja betul – betul diaplikasikan sebagai alat evaluasi kinerja untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai program-program pemerintahan dan pembangunan.
4. Agar setiap Unit Kerja membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
5. Masing-masing Unit Kerja dapat melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan didasarkan pada capaian indikator kinerja.

Demikian LAKIP Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2023, semoga dapat memberikan informasi maupun parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar.

Pematangsiantar, Maret 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**JULHAN SITUMORANG**  
Perhubungan (IV/b)  
NIP. 19700528 199601 1 001